



**TINJAUAN KRITIS ATAS AKSI DEMONSTRASI DALAM
SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat**

**Oleh
VELISIANUS RUDI
NPM: 20.75.6935**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO
2024**

LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Velisianus Rudi
2. NPM : 20.75.6935
3. Judul : Tinjauan Kritis atas Aksi Demonstrasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

4. Pembimbing:

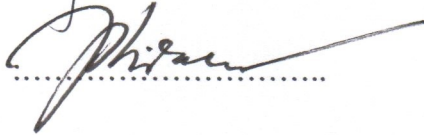
1. Dr. Mathias Daven
(Penanggung Jawab)


.....

2. Dr. Felix Baghi


.....

3. Dr. Philipus Ola Daen


.....

5. Tanggal diterima

: 17 Maret 2023

6. Mengesahkan:
Wakil Rektor I



Dr. Yosef Keladu

7. Mengetahui
Rektor IFTK Ledalero





Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian
dari Syarat-syarat guna Memperoleh
Gelar Sarjana Filsafat
Program Studi Ilmu Filsafat

Pada
25 Mei 2024

Mengesahkan

INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO



Rektor,

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

1. Dr. Mathias Daven

2. Dr. Felix Baghi

3. Dr. Philipus Ola Daen

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Velisianus Rudi

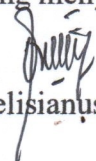
NPM : 20.75.6935

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 27 Mei 2024

Yang menyatakan


Velisianus Rudi

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Velisianus Rudi

NPM : 20.75.6935

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

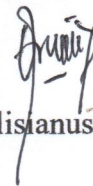
Tinjauan Kritis atas Aksi Demonstrasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 27 Mei 2024

Yang menyatakan



Velisianus Rudi

KATA PENGANTAR

Berakhirnya rezim Orde Baru tahun 1998, menjadi babak baru bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Hal ini ditandai dengan kehidupan politik yang mengalami perubahan yang signifikan. Negara memberikan jaminan politik bagi setiap warga negara. Pemerintah membuka diri terhadap segala situasi ketidakadilan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah mulai menunjukkan sikap politik yang lebih responsif dan akomodatif. Sementara itu, pada sisi lain, masyarakat juga memiliki ruang kebebasan yang begitu besar. Masyarakat tidak lagi mengalami kebungkaman hak-hak politis seperti yang dialami selama Orde Baru. Masyarakat tidak lagi menjadi subjek pasif dalam kehidupan politik, sebaliknya menjadi proaktif. Masyarakat dengan kesadaran yang tinggi akan kehidupan yang adil dan sejahtera memiliki kekuatan dan sikap yang kritis terhadap segala kebijakan dan kinerja pemerintah.

Dari seluruh dinamika berkembang yang terjadi pasca Orde Baru, salah satu hal penting yang terjadi ialah adanya ruang kebebasan menyatakan pendapat di muka umum bagi masyarakat sipil. Kebebasan menyatakan pendapat menjadi sumber dasar keikutsertaan yang aktif dari masyarakat sipil untuk mengkritisi segala kebijakan dan kinerja pemerintah. Masyarakat memiliki keberanian politik yang tinggi untuk menuntut kehidupan yang adil dan sejahtera.

Salah satu bentuk dari keberanian politik dan keikutsertaan masyarakat sipil dalam politik ialah adanya aksi demonstrasi. Demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyatakan aspirasi kepada pemerintah. Masyarakat dengan hak dan kebebasannya memiliki tanggung jawab untuk berperan aktif dalam mengontrol kehidupan politik negara.

Demonstrasi menjadi salah satu bentuk partisipasi politik yang paling populer. Maraknya demonstrasi menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan kehidupan politik. Demonstrasi senantiasa mewarnai segala bentuk kebijakan dan kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan umum. Demonstrasi dijadikan sebagai instrumen pengontrol jalannya pemerintahan oleh masyarakat sipil. Demonstrasi pun dijadikan sebagai langkah untuk membongkar struktur ketidakadilan.

Secara hukum demonstrasi yang sering terjadi dalam sistem demokrasi merupakan sesuatu yang mendapat legitimasi. Demonstrasi menjadi sesuatu yang wajar dan sah, termasuk di Indonesia. Sebab demonstrasi merupakan bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, warga negara Indonesia dijamin kebebasannya untuk berpendapat. Demikian pun halnya demonstrasi secara konkret mendapat legitimasi hukum. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum mendefinisikan demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum.

Maraknya aksi demonstrasi yang terjadi dalam sistem demokrasi Indonesia hingga akhir ini tentu menjadi arah yang positif bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Demonstrasi telah memberikan pengaruh yang cukup penting bagi segala kebijakan pemerintah. Salah satu contoh dari efektivitas demonstrasi terhadap perkembangan demokrasi ialah demonstrasi tahun 1998 yang berhasil menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden kerana dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Segala bentuk kebijakan dan kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama akan mendapat perlawanan dari masyarakat yakni melalui demonstrasi. Dalam sistem demokrasi, akan selalu ada ruang bagi aksi demonstrasi kerana merupakan bentuk dari pernyataan pendapat yang dilakukan oleh masyarakat terhadap segala kebijakan pemerintah yang tidak pro kepentingan umum.

Akhirnya, dalam proses menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis menyadari begitu banyak menerima masukan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh kerana itu, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Secara istimewa penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Mathias Daven yang dalam segala ketekunannya sebagai pendidik dan formator telah membimbing penulis untuk menggali, mendalami, dan menjelaskan serta membantu penulis untuk memahami lebih dalam tentang aksi demonstrasi dalam

sistem demokrasi di Indonesia. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Felix Baghi selaku penguji yang telah dengan teliti membaca karya ilmiah ini dan memberi masukan berharga bagi karya ilmiah ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pendidikan Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero dan Seminari Tinggi Interdiokesan Santo Petrus Ritapiret yang telah membesarkan penulis dalam asuhan nilai-nilai akademik dan nilai-nilai moral tentang hidup.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua (Bpk. Paulus Rudi dan Mama Letvina Edis), saudara (Teobaldus Junaidi Rudi dan Alfreno Demaitus Rudi) yang telah dengan ikhlas mendedikasikan ilmunya untuk pertumbuhan dan perkembangan pribadi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada sahabat, saudara dan saudari yang tidak sempat disebutkan namanya untuk segala dukungan moral maupun materil kepada penulis. Kalian adalah penyumbang terbesar dalam mendidik penulis. Kepada kalian semua penulis mempersembahkan butir-butir ide dalam karya ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan-kritikan konstruktif demi memperkaya ide dan isi dari karya ilmiah ini. Semoga tulisan ini mampu menghadirkan semangat akademik yang konstruktif demi pengembangan demokrasi di Indonesia dan semoga penggunaan hak menyatakan pendapat di muka umum melalui aksi demonstrasi semakin kritis. Terutama demi penguatan nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Terima kasih dan selamat membaca!

Ritapiret, Mei 2024

Penulis

ABSTRAK

Velisianus Rudi, 20.75.6935. *Tinjauan Kritis atas Aksi Demonstrasi dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*. Skripsi. Program Sarjana, Program Studi Ilmu Filsafat Agama Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. 2024.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan aksi demonstrasi yang terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia; dan (2) meninjau secara kritis sejauh mana demonstrasi memberikan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Dengan penelitian pustaka, penulis berusaha mencari sumber dari buku-buku, majalah, serta artikel-artikel ilmiah yang memiliki hubungan dengan tema tulisan sebagai sumber rujukan bagi penulis.

Berdasarkan analisis penulis, penelitian ini merangkum dua persoalan utama. Pertama, aksi demonstrasi dalam sistem demokrasi menjadi sesuatu yang wajar dan sah dalam sistem demokrasi. Aksi demonstrasi menjadi suatu keniscayaan jika tidak dilakukan dalam sistem demokrasi. Demonstrasi dalam sistem demokrasi merupakan aktualisasi dari masyarakat sipil akan kebebasan menyatakan pendapat di muka umum. Secara khusus di Indonesia, demonstrasi mendapat legitimasi melalui Undang-Undang No. 9 tahun 1998. Kedua, demonstrasi sebagai instrumen yang digunakan oleh masyarakat sipil dalam dirinya bersifat ambivalen. Ambivalensi demonstrasi nyata dalam pengaruhnya terhadap penghayatan akan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi yang dimaksud ialah kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Pada satu sisi demonstrasi memberikan penguatan terhadap nilai-nilai demokrasi, tetapi pada sisi lain demonstrasi sering kali mencederai nilai-nilai demokrasi. Secara konstruktif demonstrasi sebagai pengontrol jalannya pemerintah dengan segala kebijakan yang ada di dalamnya. Demonstrasi memberikan kritikan dan saran kepada pemerintah agar dapat menjalankan praktik politik dengan baik, terutama demi kepentingan bersama dan penguatan demokrasi. Sementara itu, demonstrasi dapat menampilkan wajah destruktif ketika demonstrasi dilandasi oleh alasan sentimen primordial, adanya anarkisme yang mengakibatkan adanya perusakan fasilitas umum, stabilitas publik terganggu, hingga pada kehilangan nyawa dari para demonstran.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menekankan pentingnya demonstrasi damai yang berpegang teguh pada nilai-nilai demokrasi dan semangat Pancasila agar tidak mendorong terjadinya tindakan anarkis. Demonstrasi harus berfokus pada penyampaian pendapat di muka umum seperti orasi dan melayani kepentingan publik dari pada agenda individu atau kelompok.

Kata kunci: demokrasi, demonstrasi, keadilan, kebijakan pemerintah, masyarakat, anarkisme dan Pancasila.

ABSTRACT

Velisianus Rudi, 20.75.6935. *A Critical Review of Demonstrations in The Democratic System in Indonesia*. Thesis. Undergraduate Programme, Philosophy Study Programme, Ledalero Institute of Creative Philosophy and Technology. 2024.

This research aims to (1) describe and explain demonstrations that occur in the democratic system in Indonesia; and (2) critically review the extent to which demonstrations provide reinforcement of democratic values in Indonesia. The method used in this research is descriptive qualitative method. This type of research is a literature study. With library research, the author tries to find sources from books, magazines, and scientific articles that have a relationship with the theme of the writing as a reference source for the author.

Based on the author's analysis, this research summarises two main issues. First, demonstrations in a democratic system are something that is natural and legitimate in a democratic system. Demonstrations are a necessity if they are not carried out in a democratic system. Demonstrations in a democratic system are an actualisation of civil society's freedom of expression in public. Specifically in Indonesia, demonstrations are legitimised through Law No. 9 of 1998. Secondly, demonstrations as an instrument used by civil society are ambivalent. The ambivalence of demonstrations is evident in its influence on the appreciation of democratic values. The democratic values in question are freedom, equality and brotherhood. On the one hand, demonstrations strengthen democratic values, but on the other hand, demonstrations often harm democratic values. Constructively, demonstrations control the running of the government with all the policies in it. Demonstrations provide criticism and suggestions to the government so that it can carry out political practices properly, especially for the common interest and strengthening of democracy. Meanwhile, demonstrations can show a destructive face when demonstrations are based on reasons of primordial sentiment, anarchism that results in the destruction of public facilities, disrupted public stability, and loss of life of the protesters.

Base on this research, the author emphasizes the importance of peaceful demonstrations that adhere to democratic values and the spirit of Pancasila to avoid promoting anarchy. Demonstrations should focus on delivering public opinions through speeches and serve the public interest rather than individual or group agendas.

The Keyword: democracy, demonstrations, justice, government policy, society, anarchism and Pancasila.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Metode Penulisan	9
1.4 Tujuan Penulisan	9
1.4.1 Tujuan Umum	9
1.4.2 Tujuan Khusus	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORETIS TENTANG DEMOKRASI DAN DEMONSTRASI	11
2.1 Pemahaman Dasar tentang Demokrasi.	11
2.1.1 Sejarah Perkembangan Demokrasi	12
2.1.2 Pengertian Demokrasi	16
2.1.3 Ciri-Ciri Demokrasi	18
2.1.4 Nilai-Nilai Demokrasi.....	20
2.1.5 Asas-Asas Demokrasi	21
2.1.6 Bentuk-Bentuk Demokrasi.....	23
2.1.7 Kesimpulan	25
2.2 Pemahaman Dasar tentang Demonstrasi.....	25
2.2.1 Sejarah Demonstrasi	26
2.2.2 Pengertian Demonstrasi	27
2.2.3 Sebab terjadinya Demonstrasi.....	28
2.2.4 Tujuan Demonstrasi	29
2.2.5 Dualisme Makna Demonstrasi	29
2.2.5.1 Demonstrasi sebagai Partisipasi Politik	29

2.2.5.2 Demonstrasi sebagai Konflik Politik	31
2.2.6 Kesimpulan	32
BAB III DINAMIKA DEMOKRASI DI INDONESIA DAN LEGITIMASI DEMONSTRASI	33
3.1 Demokrasi di Indonesia	33
3.1.1 Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)	36
3.1.2 Demokrasi Parlementer (1950-1959)	37
3.1.3 Demokrasi Terpimpin (1959-1965)	38
3.1.4 Demokrasi Pancasila pada Masa Pemerintahan Orde Baru (1965-1998)	39
3.1.5 Demokrasi Pancasila pada Masa Reformasi (1998-sekarang)	41
3.2 Legitimasi Demonstrasi di Indonesia dan Hak Asasi Manusia	43
3.3 Demonstrasi dan Etika Penyampaian Pendapat di muka Umum	46
3.4 Demonstrasi dan Proseduralisasi	47
3.5 Maraknya Demonstrasi dan Pergeseran Nilai	48
3.6 Demonstrasi bukan Demo <i>Crazy</i>	51
3.7 Demonstrasi dan Tuntutan Keadilan	53
BAB IV DEMONSTRASI SEBAGAI LANGKAH MEMBONGKAR STRUKTUR KETIDAKADILAN DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA	55
4.1 Mengapa harus Demonstrasi?	55
4.2 Perdamaian sebagai Nilai Sosial Fundamental	58
4.3 Demonstrasi dan Situasi Dilema dalam Mengelolah Konflik Ketidakadilan ..	60
4.4 Paham Konflik Terbatas dalam Konteks Upaya Membongkar Struktur Ketidakadilan	61
4.5 Ambivalensi Demonstrasi	63
4.5.1 Wajah Konstruktif Demonstrasi.	64
4.5.2 Wajah Destruktif Demonstrasi	65
4.6 Demonstrasi dan Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi di Indonesia	66
4.7 Catatan Kritis	79
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	89
5.2.1 Bagi Masyarakat Sipil	89
5.2.2 Bagi Pemerintah	90
5.2.3 Bagi Para Aktivis	90
DAFTAR PUSTAKA	91